

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil perhitungan analisis *Gap* dan analisis komparatif terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan realisasi anggaran program wajib belajar 9 tahun, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tingkat pendidikan dasar (SD)

Dari tabel 5.5 dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Indikator dengan nomor urut 11 (Jam kerja guru/minggu: 37,5 jam), indikator nomor 12 (Tatap muka/minggu: kelas I-II: 18 jam, kelas III: 24 jam, kelas IV-VI: 27 jam), indikator nomor 13 (Menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP), sudah mencapai 100% dengan kesenjangan = 0, sepadan dengan bobot nilai 50,5 yang menempati rangking 2.
- b. Indikator nomor urut 1 (Jarak jangkauan jalan kaki dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil maksimal 3 Km), kesenjangannya = (0,79%), dengan bobot nilai 50,25, menempati rangking 4.
- c. Indikator nomor urut 4 (Ketersediaan guru: rasio-siswa/guru maksimal 32 orang, 6 guru/satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 guru/satuan pendidikan), indikator nomor 5 (Kualifikasi guru: tersedia 2 orang guru S1/D4 dan 2 orang guru memiliki

sertifikat pendidik), indikator nomor 7 (Kualifikasi pengawas sekolah: S1/D4 dan bersertifikat), kesenjangan = (10%), dengan bobot nilai 45,5, menempati rangking 6.

- d. Indikator nomor urut 6 (Kualifikasi kepala sekolah: S1/D4 dan bersertifikat) dan indikator nomor 2 (Rasio-siswa/kelas maksimal 32 orang) masing-masing kesenjangan = (50%) dan (77,6%), dengan bobot nilai 25,5 dan 11,5 serta menempati rangking 12 dan 13.
- e. Dari tabel 5.3 terlihat perkembangan rata-rata kesenjangan per tahun = (10,31%) dan dalam bobot nilai rata-rata perkembangannya = 2,96%.

2. Pada tingkat pendidikan dasar (SMP)

Dari tabel 5.6 dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Indikator nomor urut 12 (Jam kerja guru/minggu: 37,5 jam), indikator nomor 13 (Tatap muka/minggu: 27 jam), indikator nomor 14 (Menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP), sudah mencapai 100% dengan kesenjangan = 0, sepadan dengan bobot nilai = 50,5, yang menempati rangking 2.
- b. Indikator nomor urut 1 (Jarak jangkauan jalan kaki dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil maksimal 6 Km), kesenjangan = (0,79), dengan bobot nilai = 50,25, menempati rangking 4.
- c. Indikator nomor urut 6 (Ketersediaan guru: 1 guru/mata pelajaran, maksimal 32 orang, 6 guru/satuan pendidikan, dan untuk daerah

- khusus 1 guru/rumpun mata pelajaran), indikator nomor 7 (Kualifikasi guru: 70% guru S1/D4, 35% bersertifikat, dan untuk daerah khusus 40% dan 20%), indikator nomor 9 (Kualifikasi pengawas sekolah: S1/D4 dan bersertifikat), kesenjangannya = (10%), dengan bobot nilai = 45,5, menempati rangking 6.
- d. Indikator nomor urut 3 (Tersedia laboratorium IPA yang cukup untuk 36 siswa) dan indikator nomor 2 (Rasio-siswa/kelas maksimal 36 orang), masing-masing kesenjangannya = (27,66%) dan (65,96%), dengan bobot nilai 36,75 dan 17,5, masing-masing menempati rangking 13 dan 14.
- e. Dari tabel 5.4, terlihat rata-rata perkembangan kesenjangan per tahun = (8,95%) dan dalam bobot nilai rata-rata perkembangannya per tahun = 2,74%.
3. Realisasi anggaran untuk program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2010 realisasinya 81,88% (tabel 5.7), tahun 2011 realisasinya 88,32% (tabel 5.8), tahun 2012 = 90,59% (tabel 5.9).

6.2 Saran

1. Data capaian/realisasi SPM Dikdas seperti yang ditampilkan pada tabel 5.5 dan tabel 5.6 dapat dijadikan acuan dalam upaya perbaikan/peningkatan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), dan dalam penetapan tenggang waktu pencapaian 100%.

2. Indikator yang perlu mendapat perhatian lebih adalah indikator dengan nomor urut 6 (Kualifikasi kepala sekolah: S1/D4 dan bersertifikat) dan 2 (Rasio-siswa/kelas maksimal 32 orang) pada tabel 5.5 dan indikator 3 (Tersedia laboratorium IPA yang cukup untuk 36 siswa) dan 2 (Rasio-siswa/kelas maksimal 36 orang) pada tabel 5.6.
3. Untuk memperkecil kesenjangan, maka alokasi anggaran untuk program wajib belajar 9 tahun perlu ditingkatkan.
4. Perlu adanya koordinasi dan pengawasan dari pemerintah sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar direalisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Teknik Proyeksi Pendidikan. Jakarta
- Handoyo, Andreas dan Yunita. 2003. Pembuatan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Untuk Proses Kenaikan Jabatan dan Perencanaan Karir. Jurnal Informatika Vol. 4, No. 2. Universitas Kristen Petra
- Indra, Bastian, 2006. Akuntansi Sektor Publik. Erlangga. Jakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta
- Muchsam, Yoki dkk. 2011. Penerapan Gap Analysis Pada Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan. Universitas Widyatama Bandung
- Nasoetion, Andi Hakim dan Barizi. 1976. Metode Statistika. Gramedia. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Analisis Standar Belanja. Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta

Ritonga, Irwan Taufiq. 2009. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/756/OTDA/2002, perihal Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal

Umar, Husein. 1984. Dasar-dasar Akuntansi. BPPA YKPN. Yogyakarta

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Verra, Siska. 2007. Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimum. Universitas Andalas